

**PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT KAPAL ANTARA
PEMILIK BARANG DENGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
(STUDI PERJANJIAN PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA DAN PT.
BHANDA GHARA REKSA PERSERO MEDAN)**

ERIKA GRACIA S

ABSTRACT

Loading and unloading is one of the processes of import activities in fertilizers; it is a part of the important link of NPK fertilizer production of PT Sentana Adidaya Pratama. Without sufficient raw materials, the process of productivity cannot run punctually so that it will affect the distribution of NPK fertilizers to end-customers such as estates and other agricultural sectors. The importance of mutual agreement in loading and unloading is a written contract for the parties concerned who agree on providing and receiving employment in loading and unloading of raw materials at Belawan harbor. The process of making the contract began with making pre-contract, the negotiation between the parties concerned which was then embodied in a contract through its articles, followed by the post-contract in which they fulfill their duties according to the agreement in the contract

The conclusion of the research was that so far the balance between the right and the obligation has not been sufficiently carried out. Therefore, the parties concerned should pay more attention to the content of the contract and to all factors which are related to loading and unloading activities so any problem which arises in the field can be settled without any interpretation which can harm one of the parties in order to avoid any default. Therefore, ship loading and unloading should be implemented well, fast, and correctly and should cut down on cost as minimal as possible so that work performance and work outcome, which are righteous and satisfactory, can be accepted by each party

Keywords: Mutual Agreement in Loading and Unloading, Balance of Duties

I. Pendahuluan

Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Sentana Adidaya Pratama (selanjutnya disebut PT SAP) dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT BGR Persero menarik untuk diteliti karena perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan antara pemilik barang dengan perusahaan bongkar muat di Indonesia khususnya di PT SAP. Pekerjaan Bongkar Muat tersebut adalah salah satu proses dari kegiatan impor bahan baku pupuk yang merupakan bagian dari kegiatan mata rantai penting dalam suatu proses produksi pupuk Nitrogen Phosphate Kalium (NPK) di PT Sentana Adidaya Pratama. Tanpa ketersediaan bahan baku yang cukup maka

proses produksi tidak dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga akan mempengaruhi pendistribusian pupuk NPK ke *end-customer* antara lain perkebunan atau pertanian lainnya.

Pentingnya perjanjian kerjasama bongkar muat ini adalah sebagai perikatan tertulis bagi para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat bahan baku di Pelabuhan Belawan. Mengingat banyaknya unsur-unsur dari pekerjaan yang akan disepakati sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang tertulis yaitu perjanjian antara PT SAP selaku pemilik barang dengan PT BGR Persero selaku perusahaan bongkar muat untuk menjamin para pihak agar dapat melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan baik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Meskipun demikian hubungan kerjasama tersebut masih mengalami kendala-kendala sebab dalam hal perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tidak semata-mata hanya pihak PT SAP dan PT BGR Persero saja yang terkait didalamnya tetapi juga adanya pihak ketiga seperti Pelindo Belawan dalam hal pengurusan penyandaran kapal, buruh di pelabuhan dan digudang dalam hal pekerjaan pembongkaran di kapal dan gudang, armada pengangkutan untuk proses pengiriman pupuk dari pelabuhan menuju ke gudang, Bea Cukai melalui proses kepabeanan, penggunaan timbangan, pemakaian alat-alat berat, toleransi susut barang, hilangnya pupuk selama proses pembongkaran dan lain-lain yang ikut mempengaruhi pekerjaan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Disamping itu terdapat beberapa peraturan yang sifatnya wajib dan mengikat untuk dilaksanakan bagi setiap importir yang kapalnya akan sandar di pelabuhan tertentu dimana dampaknya dapat merugikan importir akibat pengenaan biaya yang cukup tinggi. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan ketidak-seimbangan antar hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak kerjasama antara dari PT SAP selaku importir barang dan PT BGR Persero.

Berdasarkan uraian maka diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah tesis yang berjudul: Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal Antara Pemilik Barang Dengan Perusahaan Bongkar Muat (Studi Di PT Sentana Adidaya Pratama Dan PT

Bhanda Ghara Persero Medan). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan PT BGR Persero telah memberikan keseimbangan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan.
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT SAP dengan PT BGR Persero apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan PT BGR Persero telah memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi perjanjian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh PT SAP dengan PT BGR Persero apabila terjadi sengketa.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena karakter khas ilmu hukum terletak pada metode penelitiannya yang bersifat normatif hukum, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, khaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan undang-undang dan bahan hukum lainnya untuk menganalisis permasalahan yang dibahas serta menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara

rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena karakter khas ilmu hukum terletak pada metode penelitiannya yang bersifat normatif hukum, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, khaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan undang-undang dan bahan hukum lainnya untuk menganalisis permasalahan yang dibahas serta menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

2. Sumber Data Penelitian

- a. bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,
- b. bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penjelasan mengenai bahan hukum primer (pandangan para ahli hukum),
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk wawancara dari nara sumber terkait.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen dengan menganalisa secara sistematis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang ditelaah dalam penelitian ini dan didukung oleh wawancara dengan beberapa informan, yaitu dari pihak PT Sentana Adidaya Pratama dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah melalui persetujuan DPR. Kontrak didasari dari adanya azas-azas yang penting yang mempengaruhi hukum kontrak. Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan

¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994, hal 101.

sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan.² Perjanjian tertulis terdiri dari 3 bentuk yaitu: perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak dan perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris. Jenis perjanjian kerjasama yang terjadi antara PT SAP dan PT BGR Persero adalah kontrak dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dimana yang menandatangani hanyalah kedua belah pihak saja. Meskipun demikian kekuatannya adalah mengikat bagi para pihak yang mengadakan kontrak. Para Pihak dalam kontrak kerjasama ini adalah PT SAP dan PT BGR Persero dimana kedua belah pihak adalah merupakan badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan masing-masing. KUH Perdata mengatur mengenai pihak-pihak dalam perjanjian di dalam Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317 dan Pasal 1318.

Sebagai gambaran momentum lahirnya Kontrak Kerjasama Bongkar Muat antara PT SAP dengan PT. BGR Persero dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Prakontrak meliputi tahap negosiasi, yaitu tahap komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan yang dilatarbelakangi perbedaan kepentingan³ kemudian tahap *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu pembuatan dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat, isi MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga mempunyai kekuatan mengikat;⁴
- b. Kontrak (Penyusunan Kontrak)⁵ meliputi: penulisan naskah awal; perbaikan naskah; dan penulisan naskah akhir; selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan kontrak.
- c. Pasca kontrak, meliputi: pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak dan tahap penyelesaian sengketa.

Tercapainya kata sepakat yang tertuang ke dalam kontrak kerjasama khususnya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa PT. SAP menyatakan

² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 42

³ *Ibid*, hal 124

⁴ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktek di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hal 4.

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 126

setuju dan bersedia untuk menyerahkan pekerjaan handling dan PT BGR Persero juga telah menyatakan persetujuannya untuk menerima pekerjaan tersebut tersebut adalah sekaligus merupakan pengakuan prinsip-prinsip keadilan di dalam kontrak kerjasama bongkar muat itu sendiri. Dalam hal ini teori keadilan dapat memeriksa apakah hak dan kewajiban yang diterima dalam suatu masyarakat dalam prinsip keadilan formal untuk membersihkan dari elemen-elemen kesewenangan, diskriminasi yang tak berdasarkan pada perbedaan yang relevan.⁶ Keadilan adalah untuk melindungi kebaikan dasar dan untuk menyediakan kondisi nilai yang lebih tinggi, jadi inti dari gagasan keadilan bukanlah pembalasan jasa tetapi penghindaran dari kesewenang-wenangan dan lebih utama yaitu penghilangan kekuatan yang sewenang-wenang.

Dalam suatu perjanjian kerjasama keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak merupakan hal yang utama sebagai dasar pertimbangan lahirnya perjanjian kerjasama tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, para pihak tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua yaitu tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).⁷ Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang-orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.⁸ Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal

⁶ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hal 43.

⁷ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, (Medan: Cahaya Ilmu, 2006), hal 122.

⁸ *Ibid*, hal 125.

balik. Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan pertukaran perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi.

Konsep keseimbangan awal dalam kontrak kerjasama bongkar muat (*handling*) antara PT. SAP dan PT BGR Persero dapat dilihat pada bagian awal dari kontrak tersebut dimana disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (dalam hal ini PT SAP) dan PIHAK KEDUA (dalam hal ini PT BGR Persero) telah sepakat dengan definisi, jumlah dan jenis pekerjaan (Pasal 1), pelaksanaan pekerjaan (Pasal 3), waktu pelaksanaan dan kapasitas *bagging* (Pasal 4) dan toleransi susut (Pasal 5) serta biaya atau jasa yang dikenakan atas pekerjaan tersebut (Pasal 6). Berdasarkan uraian pasal demi pasal telah dicantumkan perihal hak dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak yang telah disepakati bersama. Tetapi meskipun demikian pada saat pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut tetap ditemukan kendala-kendala yang tidak disebutkan secara rinci di dalam kontrak. Hal ini disebabkan oleh karena kendala-kendala tersebut berada diluar dari kondisi yang seharusnya dihapkan oleh kedua belah pihak.

Kontrak ini merupakan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak karena adanya proses penawaran dan penerimaan sehingga sudah mengarah kepada azas proporsionalitas, dimana apa yang menjadi penawaran oleh salah satu pihak telah diterima oleh pihak lain karena apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya telah seimbang. Dengan kata lain bahwa pembentukan suatu kontrak komersil yang dilandasi oleh pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang *fair*. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dalam klausul-klausul kontrak yang disepakati oleh para pihak.⁹

Negosiasi dalam kontrak komersial merupakan perwujudan penerapan azas proporsionalitas dengan menganut pola *win win* menuju tahapan pembentukan kontrak untuk merumuskan pertukaran hak dan kewajiban para

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 200.

pihak yang mengikat dan wajib dipenuhi.¹⁰ Dalam hal kontrak kerjasama *handling* antara para pihak meskipun sudah ditentukan porsi hak dan kewajiban masing-masing tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan-hambatan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan akibat adanya pengaruh dari faktor-faktor lain diluar dari para pihak dalam kontrak.

Proses bongkar muat (*cargo handling*) yang dilakukan di Pelabuhan Belawan memiliki keterkaitan antara pihak pengelola pelabuhan (pemerintah), pemberi jasa dan penerima jasa yaitu: PBM, EMKL, Importir/Eksportir, Pelindo, TKBM, Pengangkutan dan Pergudangan. Pihak-pihak tersebut di atas masing-masing memiliki peranan sendiri yang memiliki keterkaitan satu sama lain demi kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan dan secara umum dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
- b. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
- c. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
- d. Pekerjaan di Gudang dan Pergudangan (*Warehousing*)
- e. Armada Transportasi
- f. Pelabuhan Belawan Dan Proses Kepabeanan

Hambatan-hambatan pada perjanjian kerjasama bongkar muat di pelabuhan Belawan secara umum adalah dapat dilihat dari 2 aspek:¹¹

- a. Hambatan secara yuridis, meliputi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan baik secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak antara lain:
- b. Hambatan secara teknis, meliputi hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat proses pelaksanaan pemenuhan pekerjaan (kewajiban) sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kontrak PT. BGR Persero melaksanakan kewajibannya meliputi kegiatan: sebelum kapal sandar, pada saat kapal sandar/proses pembongkaran pupuk dimana proses pembongkaran yang dilakukan dengan tidak hati-hati, pada saat kapal

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 125.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lai Lai, Manager Operasional PT Sentana Adidaya Pratama, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, jam 14.00 WIB.

selesai bongkar ditemukan kesusutan pupuk yang telah melewati batas toleransi dan aktifitas Pergudangan yang tidak maksimal, perubahan mutu pupuk dan prinsip FIFO (*first in first out*);

Terhadap hambatan-hambatan tersebut diatas apabila salah satu pihak dalam hal ini adalah PT BGR Persero selaku pelaksana dalam kontrak berkewajiban memenuhi semua pekerjaan yang telah disepakati bersama. Tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para pihak maka akan terjadi wanprestasi. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk melakukan penuntutan baik dalam bentuk ganti rugi atau tuntutan ke Pengadilan Negeri yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Prinsip perlindungan ini berkaitan dengan azas keadilan dimana pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kontrak. Dalam perjanjian kerjasama antara PT BGR Persero dan PT SAP, ketentuan tentang *force majeure* ini juga telah diatur yaitu dituangkan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa: *force majeure* adalah keadaan tidak dipenuhinya ketentuan surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya serta diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam (gempa bumi, Tsunami, angin topan, kebakaran, banjir, gunung meletus, tanah longsor, semburan air dan lumpur yang tidak bisa dikendalikan), wabah, pemberontakan, perang, demonstrasi, huru-hara, penjarahan, pemogokan umum yang bukan kesalahan para pihak, Peraturan Pemerintah, serta kerusakan mesin/instalasi dan lain-lain yang langsung memengaruhi pekerjaan handling dan penyimpanan barang tersebut. Keadaan *force majeure* ini harus disampaikan secara tertulis dan dalam jangka waktu tertentu harus diberikan tanggapan baik berupa permintaan bukti-bukti otentik dari pihak yang menyampaikan *force majeure* tersebut. Secara tegas juga dinyatakan dalam ayat 9.4 bahwa apabila terjadi peristiwa *force majeure*

maka kedua belah pihak terbebas dari segala hak dan kewajiban yang tertera pada perjanjian tersebut.

Suatu kontrak yang baik selalu terdapat klausul mengenai cara dan akibat-akibat pemutusan kontrak. Disamping itu KUH Perdata pada Pasal 1266 menentukan bahwa ada 3 syarat untuk berhasilnya pemutusan kontrak yaitu: (1) harus ada persetujuan timbal balik, (2) harus ada wanprestasi dan pernyataan lalai, (3) harus dimintakan putusan hakim dimana tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak berada pada yuridiksi atas kontrak tersebut. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melindungi yang lemah.¹² Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut antara lain¹³: a. Wanprestasi, b. *Overmacht* (*force majeure*; daya paksa), dan c. Keadaan sulit.

Dalam tatacara pemutusan kontrak yang dilakukan oleh para pihak, disamping penentuan pemutusan kontrak tidak lewat pengadilan, biasanya ditentukan juga prosedur pemutusan kontrak oleh para pihak tersebut. Sering ditentukan dalam kontrak bahwa sebelum diputuskan suatu kontrak, haruslah terlebih dahulu diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bisa dilakukan dua atau tiga kali. Bila peringatan tersebut masih tidak diindahkan, maka salah satu pihak dapat langsung memutuskan kontrak tersebut. Penulisan kewajiban memberi peringatan seperti ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh KUH Perdata yaitu *ingebrekestelling*, yakni dengan dikeluarkannya "akta lalai" oleh pihak kreditur (lihat Pasal 1238 KUH Perdata), dimana somasi (dengan berbagai pengecualian) pada prinsipnya memang diperlukan untuk dapat memutuskan suatu kontrak.

Sengketa bisnis dalam kontrak komersial sering kali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor atau penyebab antara lain: karena ketidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan (dikarenakan orientasi mencari keuntungan semata), ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya (dikarenakan hanya tertarik kepada performa atau

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 107.

¹³ *Ibid*, hal 260

penampil fisik saja) dan tidak adanya *legal cover* yang melandasi proses bisnis (rendahnya apresiasi hukum para pelaku bisnis dalam melindungi bisnis mereka).¹⁴ Ketika suatu konflik atau sengketa menjadi berkembang semakin kompleks sehingga dapat mengancam jalannya bisnis maka para pelaku bisnis akan dihadapkan pada dua opsi yaitu penyelesaian sengketa di bidang kontrak melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan (litigasi) umumnya didasarkan pada dua pola dasar yaitu: adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹⁵ Inisiatif tindakan untuk memunculkan suatu perkara harus dilakukan oleh seorang atau lebih terhadap pihak lain yang dirasakan telah melanggar hak-haknya. Dalam hal upaya yang ditempuh melalui pengadilan, hal yang penting untuk diperhatikan adalah keabsahan dari kontrak tersebut, meskipun perjanjian yang diperbuat oleh para pihak dalam bentuk dibawah tangan, jika para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, tetapi jika salah satu pihak menyangkalnya maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkalnya dan penilaian penyangkalan tersebut harus diserahkan kepada hakim.¹⁶

Biasanya dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa. Secara umum apabila dilihat dari objek perjanjian maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan ditempat dimana objek tersebut berada meskipun demikian tetap dibuka kemungkinan untuk diadakan penyelesaian diluar dari objek tersebut berada. Dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. SAP dan PT BGR Persero penyelesaian sengketa yang dipilih diatur pada Pasal 10 ayat 10.2 yaitu melalui Pengadilan Negeri Medan. Tapi sebagaimana yang disebutkan pada ayat 10.1 bahwa sedapat mungkin perselisihan atau perbedaan pendapat sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hal 305.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hal 308.

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal 120.

Meskipun di kontrak yang telah dibuat oleh para pihak telah ditentukan cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan, namun dalam kenyataannya para pihak jarang menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan. Hal ini disebabkan oleh karena selain berbiaya besar, butuh waktu yang lama, dan menimbulkan konflik yang terus menerus dikalangan mereka. Disamping itu biasanya penyelesaian melalui pengadilan ini dihindari meskipun perkaranya benar-benar menurut hukum formal dengan alasan bahwa dalam dunia kontrak bisnis para pengusaha saling tergantung dan membutuhkan jaringan yang berkesinambungan sehingga dapat meretakkan hubungan, norma, etika dan konsepsi rasa hormat yang dianut oleh para pengusaha.¹⁷

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang biasa digunakan dalam investasi perdagangan adalah arbitrase. Arbitrase mulai dikenal dalam sistem hukum di Indonesia semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian yang bersifat tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terhadap putusan arbitrase pada dasarnya adalah bersifat final dan mengikat sehingga dapat dieksekusi secara sederhana. Akan tetapi apabila salah satu merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁸

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa diluar badan-badan pengadilan. Model penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat populer adalah arbitrase.¹⁹ Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Penilaian Ahli.

Seperti halnya kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep *win-win solution*, maka dalam hal terjadinya sengketa tentunya diperlukan upaya

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 181.

¹⁸ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal 24

¹⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 33.

penyelesaian sengketa yang terbaik dan elegan, cepat, efektif dan efisien. Menurut Agus Yudha Hernoko,²⁰ penyelesaian sengketa yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution*, terutama melalui ADR sebab melalui wadah ini keberadaan para pihak sama-sama terlindungi, kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga.

Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam hal terjadinya sengketa antara PT SAP dan PT BGR Persero adalah dengan cara negosiasi sebab metode negosiasi ini dirancang sebagai media komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Keuntungan negosiasi antara lain:

- a. Mengetahui pandangan pihak lawan;
- b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan;
- c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama;
- d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
- e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum;
- f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.

Berdasarkan informasi dari pemilik barang bahwa sengketa yang paling sering terjadi antara PT SAP dan PT BGR Persero sepanjang tahun 2014 sampai dengan bulan September adalah meliputi sengketa yang berkaitan dengan:²¹

- a. Kesusutan bahan baku sebanyak 2 kasus yaitu yang dibongkar dari kapal ke pelabuhan sampai ke gudang. Penyelesaian sengketa yang dimaksud dapat diselesaikan dengan baik melalui proses negosiasi antara para pihak melalui pertemuan-pertemuan dan pembahasan bagaimana bisa terjadi kesusutan sampai kepada proses klaim kepada PT. BGR Persero.
- b. Perubahan mutu barang pada saat pengiriman ke customer di Pontianak, dimana pada saat pupuk dikeluarkan dari gudang sampai kepada proses pengiriman ke customer ternyata ditemukan pupuk yang telah bercampur dengan tanah sehingga mengakibatkan perubahan mutu pupuk tersebut. PT SAP dalam hal ini sebagai penjual telah diklaim oleh customer dan setelah

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 310.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lai Lai, Manager Operasional PT. Sentana Adidaya Pratama pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, jam 14.00 WIB.

diinvestigasi lebih jauh diduga perubahan mutu tersebut terjadi akibat adanya kelalaian PT BGR persero pada saat proses pengangkutan pupuk tersebut. Terhadap kelalaian tersebut setelah diinvestigasi bersama-sama oleh kedua belah pihak dan melalui proses negosiasi dengan menunjukkan data, gambar dan sample pupuk serta hasil analisisnya akhirnya disepakati bahwa kerugian yang diderita oleh PT SAP akan diklaim dan dipotongkan dari tagihan pembayaran PT BGR ke PT SAP senilai kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- c. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya berat per karung @50kg/karung. Terhadap kasus ini ditemukan ada beberapa pengiriman pupuk ke customer yang setelah ditimbang ternyata ditemukan kekurangan berat per karung dari yang seharusnya @50kg/karung. Untuk itu setelah disampaikan ke pihak pengelola gudang dalam hal ini PT BGR Persero dan melalui proses negosiasi kedua belah pihak diambil kesimpulan bahwa PT BGR Persero selalu pelaku pekerjaan tersebut akan melakukan timbang ulang dan terhadap pupuk-pupuk yang ditemukan kurang berat dari yang seharusnya akan dilakukan pengangkutan ulang.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara PT. Sentana Adidaya Pratama dengan PT. Bhanda Ghara Rekha Persero masih belum memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karena pengaturan perihal hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama tersebut masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan keadilan bagi para pihak. Hal ini disebabkan karena masih diperlukannya penafsiran oleh salah satu pihak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebab kondisi-kondisi pada saat disepakatinya perjanjian sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat pemenuhan kontrak di lapangan. Kemungkinan terjadi wanprestasi dilakukan oleh PT BGR selaku pelaksana pekerjaan dalam hal pembongkaran pupuk dari kapal sampai ke gudang sangatlah besar sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang.

2. Hambatan yang ditemukan dalam perjanjian kerjasama ini antara lain: hambatan secara yuridis yaitu hambatan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku di Pelabuhan Belawan yang masih terlalu kaku sehingga mempersulit importir untuk memasukkan barang ke Indonesia, serta hambatan teknis berupa hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama antara lain tidak adanya timbangan sebagai pembanding, faktor sumber daya manusia, disamping itu sistem pengupahan yang otoriter yang mencerminkan ketidakadilan karena tidak melibatkan PBM sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh TKBM dimana TKBM terkesan lebih tidak mengutamakan profesionalisme kerja yang pada akhirnya merugikan PBM dan mengganggu kelancaran arus bongkar muat di Belawan.
3. Upaya penyelesaian sengketa sebagai pilihan hukum yang ditentukan oleh PT Sentana Adidaya Pratama dengan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) adalah upaya penyelesaian melalui Pengadilan, meskipun demikian sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena penyelesaian masih dapat ditempuh melalui musyawarah antara para pihak.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan melalui penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya sebelum pembuatan perjanjian kerjasama para pihak sudah menguasai mengenai teknik-teknik pembuatan kontrak sekaligus kondisi pada saat pelaksanaan kontrak sehingga kehendak masing-masing pihak dapat dicantumkan lebih spesifik dan terarah ke dalam pasal-pasal untuk menghindari penafsiran, memperkecil tingkat kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada saat pelaksanaan fungsi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. PT BGR Persero selaku penerima pekerjaan harus benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak secara profesional dengan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti PBM, Buruh, armada angkutan, Pelindo, Bea Cukai dan lain-lain untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu penguasaan yang baik terhadap masalah-masalah operasional

dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dilapangan berikut dengan antisipasinya sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pemenuhan kewajibannya. Disamping itu PT SAP selaku pemberi pekerjaan tetap mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian dengan menempatkan pengawas dilapangan untuk mengawasi jalannya pekerjaan pembongkaran pupuk sampai ke gudang. Khusus untuk mengatasi masalah buruh di pelabuhan, diperlukan peninjauan kembali penerapan Keputusan Bersama Direktur Jenderal untuk menghindari terjadinya monopoli dan kesewenang-wenangan karena biasanya buruh hanya akan tunduk kepada pemberi upah dalam hal ini KTKBM. Demikian pula segala produk hukum yang terkait dengan bongkar muat tersusun dengan baik dan perlu diperhatikan tatanan kepelabuhanan dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan mendorong profesionalisme serta mengakomodasi pelayanan untuk kepentingan umum.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang sudah berjalan saat ini sudah cukup baik dimana penyelesaian sengketa masih dapat diselesaikan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah dan mufakat.

V. Daftar Pustaka

A. Buku/Literatur

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ginsberg Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul, 2003.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Purba Hasim, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan, Cahaya Ilmu, 2006.

Rajagukguk, Erman, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994

B. Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Lai Lai, mewakili PT Sentana Adidaya Pratama, Manager Operasional, hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, jam 14.00 WIB